

# **FREE TRADE ZONE**

Oleh : Erni R Ernawan

## **ABSTRAK**

*Free Trade Zone (FTZ) adalah kawasan ekonomi bebas yang khusus dirancang untuk industri dengan fasilitas khusus dalam perpajakan, pelayanan cepat, dan penyediaan infrastruktur yang lengkap. Biasanya, zona-zona ini ditetapkan di bagian yang kurang berkembang di negara tersebut, karena dihapuskan zona tersebut akan menarik para pengusaha dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan stimulasi ekonomi di wilayah tersebut. Di Indonesia pengembangan kawasan baru untuk FTZ relative tidak bermasalah secara geografis karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan letaknya sangat strategis.*

Kata kunci : Free trade Zone, ekspor impor, pajak

## **I. PENDAHULUAN**

Belum lama ini wakil Presiden Yusuf Kalla menyebutkan akan dikembangkannya Sembilan zona perdagangan bebas (Free Trade Zone) dalam bidang industri dan investasi yang dilakukan di sembilan wilayah di Indonesia meliputi provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Batam, Bintan, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi dan Kalimantan

Perdagangan bebas itu sendiri berangkat dari keinginan untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara membuat negara-negara bisa mendapatkan produk yang lebih murah, sementara pada saat bersamaan, negara-negara miskin bisa meningkatkan pendapatan orang-orang miskinnya, terutama petani, peternak, nelayan, dan petambak kecil, dengan suatu cara melakukan ekspor ke negara-negara maju.

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah zona perdagangan bebas di Indonesia itu sudah mendesak untuk diberlakukan ?. dan apabila memang sudah diperlukan, sudah siapkah Indonesia bertempur, sedangkan mengetahui kekuatan pesaing luar untuk mengenali produk Indonesia yang berdaya saing saja masih sulit, karena selama ini Indonesia memang tidak memiliki system database perekonomian yang memadai, disisi lain dengan diberlakukannya FTZ dapat memicu agar investor mau masuk FTZ.

## **II. PEMBAHASAN DARI KAJIAN KONSEP**

### **(Pengertian, Syarat dan Kendala FREE TRADE ZONE)**

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga di definisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual – individual dan perusahaan-perusahaan yang berada dinegara yang berbeda. Sebagaimana terungkap antara lain dalam kespakatan perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) berikut, sasaran perdagangan beabas dalam garis besarnya adalah : (a) peniadaan hambatan perdagangan untuk memfasilitasi perpindahan lintas batas barang dan jasa antar negara.(b) pengembangan suatu kondisi untuk bersaing secara adil dalam wilayah perdaganga bebas; (c) peningkatan secara substansial peluang investasi; (d) menyediakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepemilikan intelektual secara mencukupi dan efektif; (e) penciptaan prosedur yang efektifbagi terselenggara dan terlaksananya kesepakatan perdagangan bebas; (f) penciptaan suatu landasan kerjasama yang lebih luas untuk meningkatkan dan memperluas manfaat perdaganganbebas. Jadi pada dasarnya sasaran utama perdagangan bebas adalah berupa pembukaan batas-batas kedaulatan negara bagi berangsungnya suatu pergerakan modal, barang, jasa, setra penyeragaman ketentan dan prosedur dalam melaksanakan perdaganaan antar negara.

Berbeda dengan perdagangan internasional yang sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya y Tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang di toalk oleh perdaganga bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan perusahaan besar.

Perdagangan bebas ASEAN sendiri akan dimulai than 2010, sedangkan tahun 2020 perdagangan bebas dunia akan dilaksanakan. Melalui AFTA tariff impor barang yang diperdagangkan di lingkungan asean, terutama 6 negara penandatanganan pertama (brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Fhilipina, Singapura dan Thailand) dikurangi menjadi 0 – 5 % tahun 2002, kecuali untuk produk khusus yang penting, seperti beras atau yag secara permanen tidak termasuk narkoba. Hal ini adalah upaya liberalisasi dari kondisi per 1 januari 2001, dimana sebanyak 92,8% nomor tariff berada pada tariff 0-5%, dan sisanya pada tariff di atas 5%. Untuk negara-negara asean lainnya berlaku lebih belakangan : Vietnam tahun 2006, Laos dan Myanmar tahun 2008, sedangkan kamboja tahun 2010. Telah disepakati bahwa tarif tersebut akan dikurangi menjadi 0%

pada tahun 2010 untuk 6 negara anggota pertama dan tahun 2015 untuk negara anggota baru lainnya.

Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2000 disebutkan yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Free Trade Zone ( FTZ ) adalah kawasan ekonomi bebas yang khusus dirancang untuk industri dengan fasilitas khusus dalam perpajakan, pelayanan cepat, dan penyediaan infrastruktur yang lengkap. Kawasan perdagangan bebas berdasarkan PP pengganti UU no. 1 tahun 2000 mempunyai fungsi sebagai tepat untuk mengembangkan usaha usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energy, transportasi, maritime dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbangkan, asuransi, pariwisata dan bidang lainnya.

Kawasan FTZ merupakan kawasan ekonomi bebas yang dibangun untuk menarik investasi, mengembangkan perdagangan dan ekspor, serta mengembangkan ekonomi kawasan tersebut secara keseluruhan. Free Trade Zone bisa dibentuk terbatas (enclave) dan menyeluruh. Jangka waktu suatu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah 70(tujuh puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pemberian jangka waktu selama 70 tahun itu bertujuan bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk mendorong penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan di kawasan itu dalam suasana persaingan usaha yang sehat.

Kebanyakan zona-zona perdagangan bebas ini berada di dunia ketiga. Mereka adalah zona istimewa dimana beberapa halangan perdagangan normal seperti bea ekspor atau impor diiadakan, birokrasi biasanya di rendahkan, dan perusahaan yang didirikan disana dapat diberikan diskon pajak(\*tax break\*) sebagai intensif tambahan. Biasanya, zona-zona ini ditetapkan dibagian yang kurang berkembang di negara tersebut, karena diharapkan zona tersebut akan menarik para pengusaha dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan stimulasi ekonomi di wilayah tersebut. Zona-zona ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik-pabrik untuk memproduksi barang (seperti pakaian atau sepatu).

Membicarakan free trade zone juga tidak akan lepas dari Kyoto convention yang dideklarasikan pada tanggal 18 mei 1973, yang kemudian diamanatkan di Brussel tanggal 26 juni 1999. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa pengaturan luas FTZ diserahkan pada kebutuhan negara masing-masing dan juga harus memperhatikan masalah pemberian fasilitas bea masuk, PPN, dan PPhBM.

Dalam mengembangkan Free Trade Zone ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :

1. Dengan membangun sistem infrastruktur yang baik, sehingga investor dapat tertarik. Misalnya fasilitas jalan yang tidak rusak dan bebas hambatan, tersedianya bandara dan pelabuhan internasional.
2. Penerapan regulasi yang mendukung, misalnya dengan memberi fasilitas dan insentif fiskal yang menarik dan bersifat khusus.
3. Mengetahui betul beberapa kekuatan kita yang beberapa kekuatan kompetitor. Misalnya dengan meningkatkan kemampuan negosiasi perdagangan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi Indonesia. misalnya menyangkut masalah gula. Jika gula lokal mampu bersaing dengan gula impor, dengan harga jual yang relative sama membuat sebagian besar konsumen lebih memilih untuk membeli gula lokal yang mereka rasakan lebih manis
4. Aspek-aspek lain yang mendukung terciptanya suatu iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi daerah sehingga pengembangan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak merugikan daerah disekitar Free Trade Zone,, contohnya kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi pada pengembangan tambak yang intensif. Di Jawa, pengembangan tambak udang dipantai utara Jawa telah mengorbankan hutan bakau yang ditebang untuk pembuatan lahan tambak

Di Indonesia pengembangan kawasan baru untuk FTZ relative tidak bermasalah secara geografis karena Indonesia memiliki ribuan pulau, banyak yang tidak berpenghuni. Tetapi letaknya strategis, seperti biak yang dekat dengan samudra pasifik ataupun daerah blitung yang berdekatan dengan Philipina. Dengan strategi FTZ, pulau yang tidak ada kegiatan ekonomi dapat dikembangkan menjadi pusat industri dan investasi, contohnya pulau Batam. Dahulu pulau ini sedikit penghuninya, namun dengan strategi menarik investasi Singapura yang notabene dekat dengan Batam, maka Batam sekarang menjadi berkembang pesat. Perjalanan pengembangan di Batam dimulai dengan diterbitkannya Kepres nomor 74 tahun 1971 tentang keputusan pengembangan pulau Batam, kemudian diterbitkan lagi Keppres nomor 41 tahun 1973 yang menjadikan Batam sebagai daerah industri, kemudian diperluas kembali dengan diterbitkannya Keppres nomor 33 tahun 1974 mengenai penetapan beberapa wilayah usaha bonded warehouse (bebas Bea) kemudian tahun 1977 keluarlah surat keputusan dalam negeri no 43 tahun 1977, kemudian dilanjutkan dengan keppres no 41 tahun 1978 yang menjadikan Batam sebagai kawasan bebas area, kemudian dikembangkan secara terus menerus pembangunan sarana fisik yang dilakukan sampai tahun 1998.

Pengembangan 9 area FTZ itu sendiri direspon oleh pengusaha Indonesia contohnya Makassar menginginkan arus masuk dan keluar rotan menjadi lebih lancar, karena kebutuhan rotan dalam negeri adalah 150 ribu ton per tahun. Namun produksi dalam negeri hanya mencapai 125 ribu ton pertahun. Di Jawa Barat di kawasan Cirebon

juga memungkinkan untuk dikembangkan karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi antara lain dengan adanya pelabuhan, bandara, industri rumah tangga dan pabrik yang juga memiliki area agro bisnis yang cukup.

Penerapan FTZ di Indonesia sendiri menemui beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut diantaranya adalah

1. Membangun FTZ memerlukan dana yang cukup besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menjadikan industri dan perdagangan semakin berkembang. Di Indonesia sangat sulit diperoleh dari pos APBN. Pembangunan infrastruktur ini juga untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengembangan FTZ.
2. Memasuki perdagangan bebas juga diperlukan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dan teknologi.
3. Adanya inkonsistensi regulasi, terutama dalam masalah PPN seperti yang terjadi di Batam. Sebelumnya kegiatan produksi yang berorientasi ekspor dibebaskan dari PPN, sedangkan untuk perdagangan local baru dikenakan PPN. Namun pemerintah mengenakan PPN juga untuk produksi yang berorientasi ekspor.

### **III. PENUTUP**

Bertolak dari kendala yang ada, maka alternatif yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Dalam masalah anggaran pemerintah dapat melakukan pembangunan otoritas FTZ sendiri seperti di Batam; kawasan tersebut disewakan kepada negara lain dalam jangka waktu tertentu, namun kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia, membuat kerjasama otoritas dengan kekuatan kontribusi kekuatan masing-masing. (didik J.Rachbini)
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dalam segi Bahasa ataupun memberdayakan lembaga diklat yang terakreditasi baik nasional maupun internasional. Satu yang dapat dicontohkan adalah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap industrialisasi, yang dianggap sebagai lawan dari sektor tradisional (khususnya pertanian), karena industrialisasi adalah cara berfikir atau cara mengelola sumber-sumber daya, jadi bukan menggusur pertanian jadi industri, tapi mengelola pertanian secara industri, tapi mengelola pertanian secara industri dengan teknik-teknik dan manajemen yang modern, yang artinya memberi nilai tambah terhadap komoditas mentah.
3. Payung hukum yang jelas dan tegas sangat diperlukan. Pemerintah seharusnya tetap konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan, supaya investor tidak ragu dan bahkan memindahkan usahanya karena ketidakjelasan peraturan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini harus diperhatikan benar oleh pemerintah, karena sudah ada contoh dengan hengkangnya

perusahaan *foot/loose* yang padat karya seperti tekstil dan sepatu karena tidak ada kepastian dan hukum di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

PP Pengganti UU No. 1 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.tempointeractive.com](http://www.tempointeractive.com)